

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
(PSIDa) OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Oleh : Nurul Oktaviana

Email: nurul.oktaviana04@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S. IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 2829

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government has substance in innovating for Regional Government as the basis for developing effective, efficient and participatory public services. In accordance with the Minister of Research and Technology and Minister of Home Affairs Regulation Number 03 of 2012 and Number 36 of 2012 concerning Strengthening the Regional Innovation System, BPPD has a central role in driving the strengthening of the innovation system in the region. Balitbang Riau Province has the task of helping the Governor carry out the functions of supporting government affairs which are the regional authority in strengthening the regional innovation system. The formulation of the problem in this study is (1) how is the implementation of the regional innovation system strengthening program (PSIDa) by the Riau Province Research and Development Agency in 2017? (2) what are the inhibiting factors in implementing the regional innovation system strengthening program (PSIDa) by the Riau Province Research and Development Agency in 2017?. This study aims to (1) describe the implementation of the regional innovation system strengthening program (PSIDa) by the Riau Province Research and Development Agency in 2017, (2) describe the inhibiting factors in implementing the regional innovation system strengthening program (PSIDa) by the Research and Development Agency Province of Riau in 2017. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted at the Riau Province Research and Development Agency. Data collection techniques carried out were through interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study concluded that the implementation of the regional innovation system strengthening program (PSIDa) by the Riau Province Research and Development Agency in 2017 was viewed through aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures that were not fully optimal. The implementation of the Regional Innovation System Strengthening Program by Riau Province Balitbang still needs to improve the quality and quantity of functional researchers and engineering officials, increase the portion of the budget in stages, increase operational support capacity, and improve coordination, socialization and understanding of regional innovation system strengthening program policies.

Keywords: Strengthening Regional Innovation Systems, Implementation of Policies, and Regional Innovations

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah, maka sistem inovasi daerah mejadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan seperangkat kebijakan yang tepat, guna mendongkrak daya saing daerah. Pada pasal 209 huruf e menegaskan keberadaan organisasi perangkat daerah yang berbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.¹ Balitbang tersebut yang akan menyelenggarakan kebijakan inovasi daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Balitbang Provinsi Riau melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Kewajiban tersebut disamping sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan juga didasarkan atas kebutuhan pembangunan Pemerintah Provinsi Riau untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Riau, pasal 3 menyebutkan Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 4 menyebutkan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sekretaris, bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang inovasi dan teknologi, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ayat (2) menjelaskan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Pada pasal 3 menjelaskan bahwa inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip yakni peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Adapun pada pasal 4 menyebutkan bahwa inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 843/XII/2013 Tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Provinsi Riau Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa), perlu dibentuk tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Provinsi Riau. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah dibantu oleh kelompok kerja (Pokja) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Daerah Provinsi Riau dan Sekretariat Tim Koordinasi PSIDa Provinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau tersebut mengenai tim koordinasi PSIDa, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau berkedudukan sebagai sekretaris dan di dalam susunan keanggotaan kelompok kerja PSIDa, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau ditetapkan sebagai ketua.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa), khususnya Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik, efektif, dan maksimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya koordinasi dan

komunikasi yang dilakukan antar kelembagan sistem inovasi daerah, belum terlaksananya peran sentral Balitbang Provinsi Riau sebagai koordinator pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Riau karena tidak adanya kerjasama yang dilakukan dengan Dinas atau Badan OPD-OPD terkait yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Gubernur Riau mengenai pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah di Riau. Selain itu masih kurangnya kuantitas pegawai pejabat fungsional peneliti dan perekeyasa Balitbang Provinsi Riau di setiap bidang dengan keahlian masing-masing dibidangnya serta masih kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa) sehingga pemahaman pelaksanaan program sangat tergantung pada masing-masing pelaksana. Melihat kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III dalam Augustino bahwa ada empat faktor yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan atau pelaksanaan program.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Tahun 2017 ?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi
Riau tahun 2017?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terutama menyangkut upaya dalam pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa) untuk mendukung pembangunan daerah dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang

diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat kelompok atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016. hlm. 135.

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.³

Edward III mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:⁴

1. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Keberhasilan suatu komunikasi dalam kebijakan tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah (*Implementators*) dalam berkomunikasi, kenyataan ini dibuktikan dari banyak hasil penelitian yang menegaskan pentingnya keterampilan berkomunikasi aparatur pemerintahan sehingga menghasilkan perubahan dan meningkatkan kinerja *implementators*.⁵

³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2016. hlm. 128.

⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 85.

⁵ Dr.H.Nurdin Basirun S.Sos., M.Si, *Kehumasan Pemerintah Daerah Perubahan Paradigma dari Komunikasi Searah ke*

2. Sumberdaya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk membawa kebijakan secara efektif.

3. Disposisi atau perilaku

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi dibuat agar terjadi kesesuaian dalam organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Dalam implementasi kebijakan komunikasi memiliki tiga hal penting yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sumber Daya juga mendukung proses implementasi kebijakan yang meliputi beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Terdapat tiga bentuk disposisi atau sikap dalam implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana dan petunjuk atau arahan pelaksana. Kemudian faktor struktur birokrasi yang mempengaruhi poses keberhasilan proses implentasi memiliki dua aspek yakni satandar

Komunikasi Timbal Balik, Bandung, Pustaka Giratuna, hlm. 23.

operasional prosedur (SOP) dan adanya fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Adapun dalam wawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dengan mencatat atau merekam jawaban dari informan tersebut. Menurut Pohan dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-

undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸ Adapun dalam dokumentasi menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulid pada tahun 2017 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan data mentah yang diperoleh dari rekaman wawancara, catatan tertulis, dan dokumen lainnya ketika berada di lapangan. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan verifikasi data yaitu merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

PELAKSANAAN PROGRAM Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) OLEH Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Tahun 2017

Tugas implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implemntasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectivitas*), dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

⁶Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 183.

⁷ Prastowo, Op. Cit., 212.

⁸ Prastowo, Op. Cit., 226.

kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui faktor-faktor dan variable yang mempengaruhinya untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang digunakan dalam untuk menganalisis implementasi kebijakan, akan tetapi konsep atau teori yang dikemukakan oleh George Edward III digunakan penulis untuk melihat faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan publik, termasuk untuk melihat proses pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah yaitu melalui aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi atau sikap pelaksana, dan aspek struktur birokrasi.

Selanjutnya adalah pemaparan pelaksanaan dalam Program penguatan sistem inovasi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

1 Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu program. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan dan pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan tersebut dapat berjalan bila komunikasi dilakukan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dapat tercapai. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Agar pelaksanaan efektif, siapa pun yang bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus dikerjakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Artinya bahwa pemerintah untuk mengimplementasi kebijakan harus dikomunikasikan (ditransmisikan) kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok atau lembaga sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implentasi kebijakan atau pelaksanaan program. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok atau lembaga sasaran akan sangat berperan.

Adapun proses komunikasi dalam pelaksanaan program

penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2017 melalui kegiatan penyusunan *grand design* kelitbang di Provinsi Riau, Pemetaan tematik potensi dan karakteristik desa dalam rangka desa inovasi di Provinsi Riau, peningkatan nilai tambah limbah ikan sebagai bahan pangan dan pakan, penyusunan masterplan pengembangan sagu serta kegiatan pengembangan produk turunan nanas sebagai produk unggulan dalam mendukung SIDa sudah dilaksanakan namun tentunya masih perlu perbaikan agar dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa) Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau telah melakukan penyaluran komunikasi intensif yakni melalui kegiatan program PSIDa dengan kebijakan penetapan surat keputusan tim yang ditentukan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan hasil wawancara Balitbang sudah melakukan komunikasi melalui pembahasan penyusunan dokumen kegiatan pada program PSIDa, seminar hasil penelitian dengan mengundang instansi terkait, workshop, penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, menjalin kerjasama kelitbang antar lembaga atau organisasi SIDa namun dalam penyaluran komunikasi yang dilakukan masih kurangnya penyebaran informasi mengenai program PSIDa kepada semua pegawai yang ada di Balitbang hanya tim yang ditunjuk saja yang mengetahui berjalannya program ini

sehingga pegawai seluruhnya belum terangkul bergerak aktif dalam pelaksanaan program ini sehingga masih ada yang belum memahami tujuan dan maksud program PSIDa untuk itu perlu ditingkatkan kembali sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh pegawai yang ada di Balitbang.

2. Aspek Sumber Daya

Untuk mencapai keberhasilan program sangat dibutuhkan sumberdaya-sumberdaya yang memadai. Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan karena meskipun pihak pelaksana kebijakan sudah melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan dan konsisten terhadap aturan, akan tetapi tanpa dukungan dari sumberdaya-sumberdaya yang cukup dan memadai maka kebijakan atau program akan mengalami hambatan untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun sumberdaya-sumberdaya yang dimaksud bukan hanya sumberdaya manusia tetapi juga sumberdaya keuangan atau anggaran, sumberdaya sarana dan prasarana yang meliputi tanah, gedung dan peralatan lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan.

Sumber-sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian atau keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah, kuantitas dan kualitas pejabat fungsional peneliti dan perekayasa masih belum memadai sesuai dengan pakararan dimasing-masing bidang.

Berdasarkan kewenangan Kepala Balitbang Provinsi Riau memberikan kebijakan dengan menunjuk pelaksana teknis kegiatan untuk melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya dan dalam menjalankan wewenang yang telah di berikan PPTK memegang peranan pokok untuk menunjuk lembaga atau perorangan yang bisa membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah dan dalam melaksanakan kerja rutin juga masih perlu dioptimalkan karena sarana ini sangat penting untuk membantu kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program. Di samping itu, terdapat potensi untuk mengembangkan teknologi informasi dalam bentuk mendukung penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, baik untuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat umum guna memberikan informasi dalam setiap program dan kegiatan. Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis sarana seperti komputer bagi pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa untuk bekerja sudah ada tetapi belum fungsional sedangkan untuk staf yang mengurus administrasi pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas komputer sudah cukup baik di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

3. Aspek Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan akan dapat teraksana sesuai keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala atau hambatan.

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan atau pelaksanaan program bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tapi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Setiap kebijakan atau program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan atau sikap penerimaan oleh para pelaksana, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDA) pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Riau telah merespon kebijakan ini dengan baik. Selanjutnya terkait pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dari Kepala Bidang, subbidang, staf dan pejabat fungsional memiliki kesamaan sikap dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah ini tetap terus dilakukan sesuai dengan visi misi Balitbang Provinsi Riau untuk mewujudkan kawasan riset dan pengembangan teknologi sebagai *center of excellent* dalam rangka menorong daya saing daerah melalui program penguatan sistem inovasi daerah dengan anggaran yang ditetapkan baik dalam bentuk peningkatan hasil kelitbang secara implementatif dan inovatif, pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya dan kerjasama kelembagaan Sistem Inovasi Daerah di Riau. Sangat diharapkan program penguatan sistem inovasi daerah terus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program yang sudah ditetapkan.

Lembaga terkait yang bekerja sama dengan Balitbang Provinsi Riau dalam menjalankan kegiatan program penguatan sistem inovasi daerah juga merespon baik kebijakan kepala badan penelitian dan pengembangan Provinsi Riau terkait kerjasama yang dilakukan untuk mendukung kelancaran program agar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan respon positif baik dari seluruh bidang yang ada di Balitbang Provinsi Riau, pejabat

fungsional Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, pihak lembaga yang dimonitoring atau lembaga terkait, maka disarankan agar komitmen yang kuat tersebut dapat ditingkatkan dan dipertahankan, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi. Dengan tetap mempedomani ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai dan terwujud lebih maksimal dan efektif kedepannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah pengaturan birokrasi dilakukan dengan adanya pengangkatan tim pelaksana dan staf sesuai bidang yang menjalankan untuk melaksanakan kegiatan dalam program ini yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi riau dan dalam menetapkan pelaksana berdasarkan sesuai dengan keahlian dan kepakaran profesi yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan program PSIDa pengangkatan birokrasi menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program PSIDa.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan program ini maka anggaran harus memadai. Pada program penguatan sistem inovasi daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau anggaran atau dana operasional kegiatan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan gubernur mengenai biaya penyelenggaraan kelitbang di Provinsi Riau namun masih menjadi kendala ketika belum layaknya porsi

anggaran dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang mengakibatkan kurangnya jumlah penelitian yang dihasilkan untuk itu dapat meningkatkan kembali porsi anggaran secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian juga dapat meningkatkan sinergisitas dengan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures/SOP*) dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan pelaksana (implementor) dalam melaksanakan tugas kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk melaksanakan kegiatan terkait program penguatan sistem inovasi daerah berdasarkan keputusan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, tim perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun kerangka

acuan kerja adapun dalam prosedur penyusunan kerangka acuan kerja dilaksanakan oleh peneliti atau perekayasa yang diarahkan oleh Kepala Balitbang yang sebelumnya kerangka acuan ini dibuat atau disiapkan oleh institusi atau lembaga untuk selanjutnya direspon dalam bentuk usulan penelitian atau kelitbangan dan usulan penelitian atau kelitbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu. Adapun dalam kerangka acuan kerja memuat dasar hukum pelaksanaan kegiatan, gambaran umum, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran ruang lingkup atau batasan kegiatan, keluaran (output) yang diharapkan, penerima manfaat, waktu dan pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, dan penutup. Tugas tim perencana berikutnya sebagai pemberi masukan dalam seminar awal dan akhir, FGD, dan draf laporan akhir. Selanjutnya tim pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, serta membuat pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai aturan yang berlaku.

Adapun tim pengawas sebagai pemberi masukan dalam seminar awal dan akhir, FGD dan draf laporan awal dan akhir serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan, dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan penunjukan tim yang sudah

ditetapkan ini harus lebih meningkatkan koordinasi dan pemahaman bagi seluruh staf dan pelaksana yang terlibat agar tujuan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa kerjasama antara satuan kerja atau fungsi sebagai pejabat pelaksana di Balitbang Provinsi Riau sudah ada upaya penyebaran tanggung jawab yang cukup baik yakni untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait sistem inovasi daerah dalam program PSIDa ini adalah pelaksana yang memang memiliki kewenangan dibidangnya seperti peneliti, perekayasa, dibantu tenaga ahli dan pembagian kerja staf

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH OLEH BALITBANG PROVINSI RIAU TAHUN 2017

A. Faktor Internal

1. Kualitas dan Kuantitas pegawai yakni pejabat fungsional peneliti dan perekayasa Balitbang Provinsi Riau masih terbatas
2. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan penguatan sistem inovasi daerah dan pemahaman pelaksanaan program sangat tergantung pada masing-masing pegawai
3. Daya dukung sarana penunjang operasional penelitian dan pengembangan masih kurang

B. Faktor Eksternal

1. Belum adanya Koordinasi antara Balitbang dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam

yang tidak memiliki kewenangan dalam penelitian dan pengembangan melaksanakan urusan administrasi dalam pembuatan surat keputusan, surat menyurat dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada program PSIDa walaupun masih harus melakukan perbaikan kinerja kedepannya. Dalam pelaksanaan program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) tidak hanya Bidang-bidang dan peneliti yang terlihat bekerja, tetapi juga adanya dukungan dari lembaga terkait sebagai pelaksana yang membantu berjalannya pelaksanaan program PSIDa di daerah Provinsi Riau meskipun masih harus meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan penguatan sistem inovasi daerah.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Provinsi Riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau memiliki dan melaksanakan program penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa). Dalam melaksanakan program PSIDa tahun 2017 Balitbang Provinsi Riau melakukan penyaluran komunikasi melalui kegiatan yang direncanakan dari program namun masih terjadi miss komunikasi karena penyaluran komunikasi yang dilakukan tidak tersampaikan kepada seluruh pegawai baik yang melakukan urusan penelitian maupun administrasi untuk mendukung terlaksananya

program PSIDa dan kurangnya sosialisasi sistem inovasi daerah karena masih adanya pegawai pejabat fungsional peneliti yang belum memahami. Balitbang Provinsi Riau menjalankan program sesuai dengan *standar operating procedures* yang sudah ditetapkan begitu juga dengan sikap pelaksana Balitbang Provinsi Riau merespon positif mengenai adanya kebijakan yang ditetapkan untuk melakukan program ini namun dalam pelaksanaannya kualitas dan kuantitas pegawai termasuk pejabat fungsional peneliti dan perekayasa Balitbang Provinsi Riau belum memenuhi untuk semua bidang dan masih memerlukan peneliti yang sesuai dengan kepakarannya untuk setiap bidang.

2. Pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah ini tentunya tidak terlepas dari hambatan yakni masih kurangnya sosialisasi mengenai sistem inovasi daerah kepada seluruh pegawai sehingga masih ada pegawai yang belum memahami kebijakan yang menyebabkan terhambatnya jalan komunikasi kemudian masih minimnya daya dukung sarana penunjang operasional penelitian dan pengembangan dan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai peneliti serta perekayasa disetiap bidang.

B. Saran

1. Diharapkan antar kelembagaan PSIDa yang telah ditetapkan lebih aktif menjalankan

komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi lagi miss komunikasi yang dapat merugikan. Kemudian lebih meningkatkan koordinasi antara kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau atau kepala bidang Balitbang Provinsi Riau dengan pejabat fungsional dan kepada seluruh pegawai yang berada dibawahnya terkait surat keputusan kepala balitbang provinsi riau mengenai pelaksanaan kegiatan pada program penguatan sistem inovasi daerah pada Balitbang Provinsi Riau.

2. Menambah dan mengoptimalkan sarana dan prasana komputer dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan bagi peneliti.
3. Diharapkan lebih aktif melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penguatan sistem inovasi daerah.
4. Diharapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau bersama kepala bidang terkait dalam program penguatan sistem inovasi daerah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mengalokasikan anggaran APBD secara bertahap dan berkesinambungan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan operasional kegiatan kelitbang sebagai prioritas dalam mendukung daya saing daerah.

5. Hendaknya lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh kelembagaan

SIDA mengenai program penguatan sistem inovasi daerah.

Surabaya: Jawa pos Institute of pro-otonomi.

Taufik, Tatang. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Prespektif: Prespektif Kebijakan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Gubernur Riau No.61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.

Basirun, Nurdin. 2014. *Kehumasan Pemerintah Daerah Perubahan Paradigma dari Komunikasi Searah ke Komunikasi Timbal Balik*, Bandung: Pustaka Giratuna.

Bungin, Burhan, 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sangadji, Etta Mamang dkk. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta, C.V Andi Offset.

Syahza, Almasdi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.

Umar, Husein. 2005. *Strategi Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wawan Sobar, dkk. 2004. *Inovasi sebagai referensi tiga tahun otonomi daerah dan otonomi award*.

Jurnal

Endah Purnama Sari, dkk. Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pemakaman & Pertamanan; Dinas Kependudukan & Pencatata Sipil dan Dinas Pemuda dan Olahraga). Jurnal Akuntansi Maranatha Vol.9 No. 2, November 2017.

Ismiatun. 2015. "Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Prespektif Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Pendekatan System Dynamics". JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume. 4. No.2.

Nurul Hilda. 2014. Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 2, Nomor 1.

Suparno. 2017. Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi, Jurnal Mimbar Administrasi. Volume 1 Nomor 1.

Sustiyo Wandu, Journal of Physical Education, Sport, Health and Reactions. Universitas Negeri Semarang. 2013.

Teguh Narutomo. 2014. Program Penguatan Sistem Inovasi Daeran

(PSIDa) sebagai exit strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM). Jurnal Bina Raja. Volume 6 Nomor 2.

Wiwandari Handayani, dkk. Tahun 2013 dengan judul Kajian Roadmap pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang. Riptek Volume 7 Nomor 2.

Skripsi

Achmad Helmi. 2010. Evaluasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhammad As'ari. 2017. Pelaksanaan program Sistem Inovasi Daerah Pelayanan Satu Hari Siap (SHS) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. Universitas Riau. Pekanbaru.

Prakoso Bhairawa Putra. 2012. Policy Review Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Dalam Kerangka Sistem Inovasi (Perbandingan Isi Kebijakan Nasional Brazil-Indonesia, dan Kebijakan Daerah Jawa Timur-Sumatera Selatan. Universitas Indonesia. Jakarta.